



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CANKA A.S. PUTRI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **640341**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.434.777.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m²/38 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 179.916.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/77 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 330.561.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m²/162 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 774.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 473.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV I-5 TURBO TC CVT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 473.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 210.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.105.937.547**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.223.714.547**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.223.714.547

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.